

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Gambaran Umum Polres Mojokerto

Polres Mojokerto yang beralamat di Jl. Gajahmada No.99 , Menanggal, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur 61382. Mojokerto dengan kondisi udara pegunungan yang relatif sejuk dikenal sebagai Kota Bersejarah, Kota Industri, dan Pariwisata menjadi daerah tujuan bagi para wisatawan baik dari daerah Mojokerto sendiri, luar kota bahkan wisatawan manca Negara juga tak sedikit yang berkunjung ke Mojokerto , investor asing maupun lokal juga menjadikan Mojokerto sebagai pilihannya, memiliki karakteristik yang khas dan komplek dengan potensi kerawanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Luas Daerah Jajaran Polres Mojokerto seluas $\pm 10.322,10$ Ha terletak di bagian Timur Wilayah Polwil Mojokerto, memiliki tujuh belas (17) Polsek yaitu¹ Polsek Sooko, Polsek Puri, Polsek Mojosari, Polsek Ngoro, Polsek Pungging, Polsek Kutorejo, Polsek Pacet, Polsek Gondang, Polsek Kemlagi, Polsek Jetis, Polsek Dawar Blandong, Polsek Jatirejo, Polsek Trowulan, Polsek Bangsal, Polsek Trawas, Polsek Gedeg, Polsek Dlanggu. Kondisi kekuatan personel Polres Mojokerto saat ini secara kuantitas mencapai 620 orang Polri dan 44

¹ PolresMojokerto.com, *Profil Polres Mojokerto*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.30 wib

Satlantas Polres Mojokerto memiliki 9 Pos diantaranya Pos Lespadangan, Pos 904 Mertex, Pos Sekar Putih, Pos 901 Trowulan, Pos Jampirogo, Pos Kenanten, Pos 905 Pacing, Pos Klenteng Mojosari, dan Pos Ngoro. Dalam Pos tersebut sudah ada pembagian kerja atau wilayah masing-masing dalam mengatur lalu lintas yaitu Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) di Mojokerto yang semakin padat dan macet dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, mayoritas banyak yang menggunakan kendaraan roda dua (2)².

a. Visi dan Misi

Visi polisi Polres Mojokerto adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berada di Wilayah Mojokerto.

Misi polisi Polres Mojokerto adalah³:

1. Dapat menjalankan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang terjangkau, optimal, efektif dan efisien.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan unsur muspida dan unsure terkait lainnya.
3. Memenuhi tuntutan masyarakat disesuaikan dengan hakekat arraman kedepan.

² *Ibid*

³ PolresMojokerto.com, *Profil Polres Mojokerto*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 09.50 wib

b. Tugas Pokok SATLANTAS Polres Mojokerto

Adapun tugas pokok Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto dengan kekuatannya bertugas menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas di seluruh wilayah Mojokerto yang meliputi⁴:

1. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas

Yaitu pendidikan masyarakat lalu lintas dalam hal ini yaitu bekerja sama, baik dengan pemerintah ataupun masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas khususnya di wilayah hukum Mojokerto, melalui program kegiatan sosialisasi yang diadakan seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas

Yaitu dengan menyelenggarakan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan ketertiban di bidang lalu lintas.

3. Penanganan Kecelakaan

Yaitu dengan menangani akibat terjadinya kecelakaan di bidang lalu lintas.

4. Penindakan

Yaitu dengan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

⁴ *Ibid*

5. Pengkajian Masalah Lalu lintas

Yaitu dengan memeriksa, menyelidiki, menguji, menelaah persoalan hukum khususnya mengenai lalu lintas.

6. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi

Yaitu dengan Pencatatan, pendaftaran, penetapan identifikasi setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan orang yang memiliki kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM.

A.3. Gambaran Umum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Mojokerto

A.3.1. Stadion Gajahmada Mojosari-Mojokerto

Stadion Gajahmada merupakan stadion kebanggaan masyarakat Mojokerto sekaligus menjadi kandang bagi tim sepakbola PSMP yang berkompetisi di Liga 2 (dua) Indonesia. Stadion Gajahmada terletak di Jl.Jotangan Mojosari-Mojokerto. Seperti halnya stadion lain, pada setiap harinya banyak kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di sekitar Stadion. Di Stadion Gajahmada ini juga memiliki gedung olahraga lain seperti gedung untuk olahraga bulutangkis dengan fasilitas yang cukup lengkap dan mampu menampung banyak masyarakat dalam kegiatan berolahraga ataupun hanya bersantai-santai menikmati suasana⁵. Selain memiliki beberapa gedung olahraga lain pada sore menjelang malam hari, banyak pedagang-pedagang kaki

⁵ Info Mojokerto, "Stadion Gajahmada", www.mjkonline.com, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 21.05WIB

lima yang mulai berjualan di sekitar area Stadion. Bahkan bisa banyak kita jumpai juga beberapa wahana permainan anak-anak seperti mandi bola, odong-odong dan lain sebagainya yang menjadikan Stadion Gajahmada ini sebagai destinasi masyarakat untuk melepas penat bersama keluarga ataupun teman sebaya. Sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti di area Stadion Gajahmada Mojokerto karena lokasi yang penulis pilih sangat ramai dan padat oleh para pengguna dan pemilik kendaraan bermotor sehingga sangat berhubungan dengan masalah yang penulis bahas berkenaan . Lokasi yang peneliti pilih adalah area sekitar Stadion Gajahmada Mojokerto

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan banyak dari kalangan remaja yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas, sebagaimana yang di ilustrasikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Area Sekitar Stadion Gajahmada Mojokerto



Hasil Observasi: Tanggal 19 Agustus 2017

Terlihat dari gambar 1 diatas menunjukkan beberapa kendaraan bermotor milik remaja yang terparkir di sekitar area Stadion Gajahmada Mojokerto telah melanggar ketentuan pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas baik bagi dirinya sendiri maupun pengendara lain, terlihat beberapa motor telah dimodifikasi dengan mengganti ban standart dengan ban yang berukuran lebih kecil sehingga jelas dapat membahayakan keselamatan berlalulintas selain itu, para pengguna motor tersebut juga tidak melengkapi kendaraanya dengan kaca spion paahal kaca spion merupakan salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib ada pada setiap kendaraan.

Dari gambar 1 yang diambil di area Stadion Gajahmada Mojokerto menunjukkan kurangnya kesadaran hukum pada kalangan remaja⁶, khususnya berkenaan dengan ketentuan pasal pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keselamatan berlalu lintas. Terlihat jelas bahwa motor milik remaja di sekitar area Stadion Gajahmada tersebut telah memodifikasi kendaraannya dengan tidak memperdulikan keselamatan berlalulintas, dimana dalam ketentuanya setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas , mengganggu arus lalu lintas , serta merusak lapis perkerasan / daya

⁶ *Ibid*

dukung jalan yang dilalui, namun pada gambar diatas tidak demikian, motor tersebut tidak memperdulikan anjuran modifikasi yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menyalahi aturan yang pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009.

A.3.2. Area Parkir Ruko Royal Mojosari-Mojokerto

Ruko Royal merupakan salah satu ruko yang cukup ramai di kunjungi masyarakat Mojokerto, karena di ruko ini terdapat beberapa fasilitas hiburan dan banyak pilihan cafe maupun restoran cepat saji yang bisa menjadi pilihan untuk sekedar bercengkrama atau makan bersama keluarga maupun teman sebaya. Selain karaoke, cafe-cafe kekinian, restoran cepat saji, bank, warung kopi lesehan dan pilihan kuliner lainnya, di belakang ruko ini terdapat kompleks perumahan yang kian hari kian ramai. Ruko Royal ini beralamat di Jl.Airlangga No.55, Seduri, Mojosari-Mojokerto Jawa Timur. Di area parkir ruko royal Mojosari ini setiap sabtu malam selalu ditempati salberbagai komunitas motor yang ada di Mojokerto, banyak kendaraan bermotor berjajar disana, sehingga peneliti memilih area parkir Ruko Royal sebagai tempat atau lokasi penelitian karena berhubungan dengan masalah yang penulis bahas berkenaan dengan Tinjauan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas⁷.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan banyak masyarakat terutama pada komunitas motor yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 3
Area Parkir Ruko Royal Mojokerto - Mojokerto



⁷ Hasil Observasi di kawasan sekitar Ruko Royal Mojokerto-Mojokerto pada tanggal 15 Agustus pukul 22.00 wib

Sehingga perlu adanya sosialisai kepada komunitas motor tentang pentingnya ketertiban berlalu lintas di Mojokerto berkenaan dengan modifikasi kendaraan bermotor⁸.

Komunitas motor merupakan tempat atau wadah para pencinta motor menyalurkan hobi. Pada gambar 2 di atas merupakan salah satu komunitas motor yang ada di Mojokerto. Deretan motor bebaris rapi di area parkir Ruko Royal. Namun terlihat beberapa motor yang telah melanggar ketertiban lalu lintas berkenaan dengan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Mulai dari kendaraan yang tidak dipasang TNKB, mengubah warna asli cat dengan warna yang mereka inginkan sehingga tidak sama dengan yang tercantum di STNK dan BPKB, dan tidak menggunakan ban standart yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian Replubik Indonesia. Sehingga semua pemilik kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar 3 telah melanggar ketertiban berlalu lintas.

A.3.3 Beberapa Ruas Jalan di Mojokerto

Dalam memudahkan mengerjakan tugas akhir skripsi berkenaan dengan tinjauan undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan, peneliti melakukan observasi di beberapa ruas jalan yang ada di Mojosari-Mojokerto, meliputi :

⁸ Hasil observasi di Area Parkir Ruko Royal Mojosari pada Tanggal 15 Agustus 2017

A.3.4 Jalan Masjid

Jalan Masjid atau yang di kenal masyarakat dengan sebutan “embong tengah” ini merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Mojokerto, ruas jalan tersebut tidak pernah sepi dilalui kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat) karena merupakan jalan yang terletak di tengah kota Mojokerto dan merupakan sentra kuliner. Di jalan Masjid juga terdapat rumah sakit, masjid besar, beberapa sekolah, cafe-cafe, dan perbelanjaan baik pakaian maupun elektronik. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan observasi di jalan tersebut berkenaan dengan tinjauan undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas⁹.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan banyak masyarakat pengendara dan pemilik kendaraan bermotor yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

⁹ Hasil observasi di Jalan Masjid Mojokerto-Mojokerto pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 22.30 wib

Gambar 4
Sekitar Jalan Masjid



Pelanggar Lalu Lintas

Hasil Observasi: Tanggal 10 September 2017

Gambar diatas diambil di Jalan Masjid Mojosari-Mojokerto. Pada gambar tersebut menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar ketentuan pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat membahayakan keselamatan berlalulintas¹⁰.

Mengubah atau memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk tindak pidana pelanggaran karena telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

¹⁰ Hasil observasi di ruas jalan masjid pada Tanggal 10 September 2017

dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor. Pada gambar 3 merupakan salah satu contoh tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor karena telah memodifikasi kendaraannya yaitu dengan menggunakan ban cacing/tapak kecil dan menggunakan setir menyerupai motor drag tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

A.3.5 Jalan Airlangga

Jalan Airlangga merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Mojokerto dan merupakan salah satu jalan utama yang terdapat di Mojokerto. Jalan Airlangga selalu dipadati oleh lalu lalang kendaraan bermotor dan kendaraan umum karena di jalan tersebut merupakan jalan utama untuk menuju ke berbagai tempat wisata di daerah pegunungan Pacet. Selain itu jalan Airlangga merupakan tempat pusat perkantoran, berbagai bank, koperasi, kuliner dan perbelanjaan. Sehingga peneliti memilih untuk melakukan observasi di jalan Airlangga Mojokerto¹¹.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan banyak masyarakat pengendara dan pemilik kendaraan bermotor yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

¹¹ Hasil Observasi di Jalan Airlangga tanggal 25 Agustus 2017 pukul 19.40 wib

Gambar 5
Pelanggar Lalu Lintas



Hasil Observasi: Tanggal 10 September 2017

Gambar diatas diambil di jalan Airlangga. Pada gambar tersebut menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas.¹².

Mengubah bentuk atau memodifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang merupakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan ban yang tidak sesuai dengan *standart* pabrikan pada umumnya. Ukuran ban pada ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor pada umumnya adalah ban depan 80/90-14 NR 80 TL dan

¹² Hasil observasi di ruas jalan Airlangga pada Tanggal 10 September 2017 pukul 20.22

ban belakang adalah 90/80-14 NR 80 TL. Sementara pada gambar hasil observasi diatas ban yang dikenakan kendaraan bermotor tersebut jauh dari ukuran pada ketentuan yang berlaku.

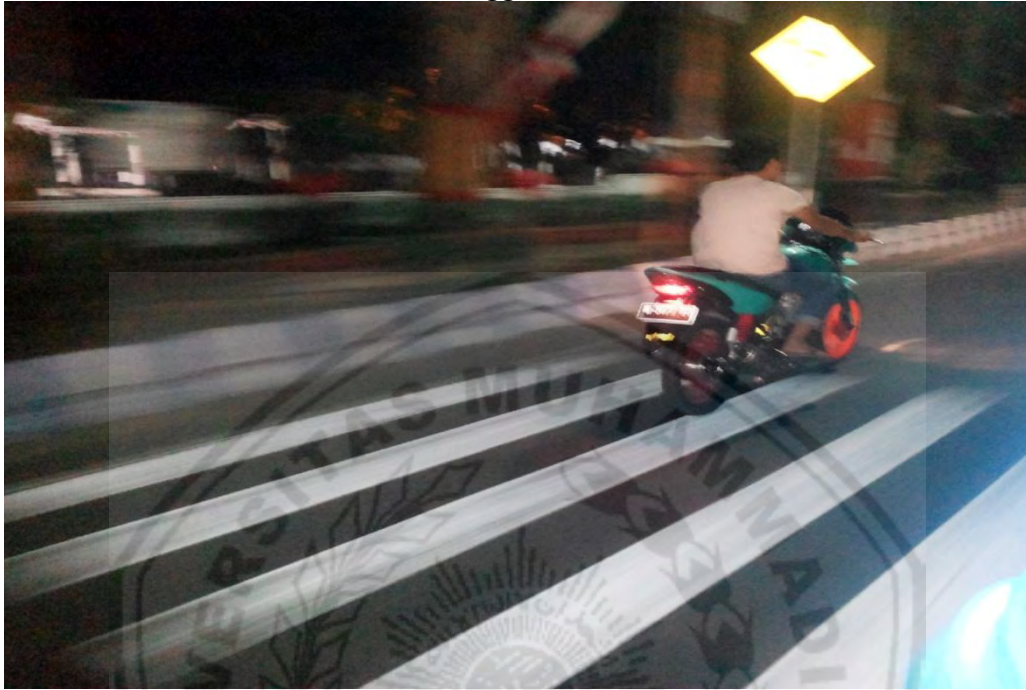
A.3.6. Jalan Raya Gajahmada

Jalan Raya Gajahmada merupakan jalan utama yang terdapat di Mojokerto. Jalan ini merupakan jalan paling padat di Mojokerto, karena merupakan jalan utama lintas kota yang tiap harinya di lewati kendaraan pribadi, kendaraan umum, bus pariwisata bahkan truk-truk bermuatan besar. Pasar tradisional, *Detasement* 503 TNI AD, rumah sakit swasta, warung kopi, ruko-ruko dan jejeran depot rumah makan dapat kita temui di jalan Raya Gajahmada ini. Sehingga menjadi salah satu kawasan yang cukup padat oleh lalu lalang kendaraan pribadi maupun umum di Mojokerto baik pada pagi hari hingga malam hari dan merupakan jalan utama dan jalan penting yang ada di Mojokerto. Untuk itu jalan tersebut menjadi pilihan peneliti untuk melakukan observasi berkaitan tugas akhir skripsi¹³.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan masyarakat pengendara dan pemilik kendaraan bermotor yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

¹³ Hasil Observasi di ruas Jalan Raya Gajahmada pada tanggal 11 september 2017 pukul 10.32 WIB

Gambar 6
Pelanggar Lalu Lintas



Hasil Observasi: Tanggal 11 September 2017

Gambar diatas diambil di Jalan Raya Gajahmada. Pada gambar tersebut menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar ketentuan pasal 58 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas¹⁴.

Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa :

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”¹⁵.

¹⁴ Hasil observasi di ruas jalan Gajahmada pada Tanggal 11 September 2017 pukul 22.15 wib

¹⁵ Wikipedia, *modifikasi kendaraan bermotor*, www.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 09.05 WIB

Jadi pada gambar 5 di atas pengendara dan pemilik kendaraan bermotor telah melanggar ketentuan ketertiban berlalu lintas terkait pasal 58 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pemasangan perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas.

A.3.7. Jalan Pemuda

Jalan Pemuda merupakan jalan yang ada Mojosari-Mojokerto, jalan ini bias cukup mudah kita temui ditemui karena merupakan salah satu jalan utama yang dapat menghubungkan Mojokerto dengan daerah sekitarnya semisal, Sidoarjo dan Surabaya. Di jalan Pemuda terdapat beberapa sekolah baik SMP maupun SMA, pabrik, ruko, pasar buah tradisional, dan beberapa warung makan yang biasanya sangat ramai jika jam pulang sekolah. Sehingga jalan tersebut tidak pernah sepi oleh lalu lintas kendaraan pribadi maupun umum. Untuk itu jalan tersebut menjadi pilihan peneliti untuk melakukan observasi berkaitan tugas akhir skripsi berkenaan dengan tinjauan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas¹⁶.

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan masyarakat pengendara dan pemilik kendaraan bermotor yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

¹⁶ Hasil Observasi pada ruas Jalan Pemuda Mojosari-Mojokerto pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 10.00 dan 19.00 WIB

Gambar 7
Pelanggar lalu lintas



Hasil Observasi: Tanggal 13 September 2017

Gambar diatas diambil di Jalan Pemuda. Pada gambar tersebut menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Karena pengendara motor tersebut telah menekuk setir/kemudi sehingga menyerupai motor *drag*.

Pelanggaran ini akan membahayakan pengendara sendiri maupun pengendara lain. Memodifikasi kemudi dengan model tekuk, memang nyaman pada saat motor melaju lurus, tetapi pada saat menikung lengan kita akan

kesulitan mengendalikan motor. Walaupun merupakan tindak pidana dengan hukuman yang ringan namun bagi seseorang yang telah melanggar tindak pidana pelanggaran merupakan cerminan seseorang yang kurang terhadap kesadaran hukum. Hal ini berarti setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Sebaliknya, keadilan lebih bersifat subyektif, individual, dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain¹⁷.

A.4.Spesifikasi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas

Mengingat begitu banyaknya macam modifikasi kendaraan bermotor, maka perlu bagi peneliti untuk menyebutkan modifikasi seperti apa saja yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Antara lain :

A.4.1. Penggunaan knalpot *free flow*/brong

Pada awalnya knalpot hanya berfungsi sebagai peredam suara dan mengatur gas yang baik dapat meningkatkan tenaga yang dihasilkan oleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, halaman 42

mesin. Sehingga setiap motor dirancang dengan knalpot yang sesuai dengan kapasitas mesin. Apabila desain tidak tepat maka akan terjadi penurunan tenaga yang dihasilkan mesin. Knalpot dapat meningkatkan performa mesin sekitar 10%-30%.¹⁸ Akan tetapi pada saat ini Knalpot telah dimodifikasi menjadi produk yang telah diubah fungsi dan modelnya menjadi lebih menarik dan garang, serta sistem peredam suaranya yang dimodifikasi sehingga bisa menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar daripada sebelumnya. Maka dari itu perubahan knalpot mempunyai dampak yang cukup berarti bagi kendaraan tersebut sehingga menimbulkan suatu masalah baru bilamana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentu saja dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berikut merupakan contoh penggunaan knalpot free flow/brong :

¹⁸ <http://knalpotpedia.com/pengertian-mekanisme-knalpot/>, diakses pada tanggal 27 September 2017 pukul 14.42 wib

Gambar 8

Pengguna knalpot free flow/brong



Pada gambar diatas menunjukkan pengendara bermotor yang telah melanggar pasal 14 Juncto pasal 65 Juncto pasal 66 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Karena pengendara motor tersebut menggunakan knalpot brong/free flow tanpa memperdulikan tingkat kebisingan, emisi gas buang dan arah pipa pembuangan knalpot tersebut mengarah langsung kepada pengguna jalan lain. Hal ini jelas dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi saat berkendara pengguna jalan lain, sehingga dapat disimpulkan bawasannya menggunakan knalpot brong ini dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Dasar Hukum :

1. Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

(1) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan.

(2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;
- b. arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
- c. asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan Bermotor; dan d. pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor.

2. Pasal 65 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

- a. Emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan Kendaraan Bermotor.
- b. Kandungan polutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
- c. Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

d. Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Pasal 66 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

a. Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau dB (A).

b. Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.

c. Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

d. Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

A.4.2. Penggunaan ban cacing/ban tapak sempit

Ban merupakan peranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat, dan digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakrataan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara kendaraan dan tanah agar pengemudi dapat menguasai kendaraannya dalam berkendara. Selain itu untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Maka dari itu perubahan ban standar pabrikan menjadi ban cacing/tapak

sempit mempunyai dampak yang berarti bagi kendaraan tersebut sehingga menimbulkan suatu masalah baru bilamana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentu saja dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berikut merupakan contoh penggunaan ban cacing/tapak sempit :

Gambar 9

Pengguna ban cacing/tapak sempit



Pada gambar diatas menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Karena pengendara motor tersebut menggunakan ban cacing/tapak sempit pada kendaraannya tanpa memperdulikan keselamatan. Hal ini jelas dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan saat berkendara pengguna jalan lain, karena dengan penggunaan ban cacing tersebut secara otomatis keseimbangan kendaraan saat

dikendarai dapat berkurang terlebih lagi jika digunakan untuk berboncengan atau sedang melalui jalan yang bergelombang maupun saat musim hujan. Ukuran ban yang terlalu kecil atau terlalu besar (tidak sesuai dengan ukuran produksi aslinya) akan mempengaruhi kinerja dari sistem rem karena memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan JBB atau JBKB sepeda motor tersebut. Yang dimaksud dengan JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya (**Pasal 1 angka 16 PP 55/2012**)¹⁹. Sedangkan, JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya (**Pasal 1 angka 17 PP 55/2012**). sehingga dapat disimpulkan bawasannya menggunakan ban cacing/tapak sempit ini dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Dasar Hukum :

1. Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

- (3) Ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.
- (4) Pelek dan ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan pada Kendaraan Bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50e06611020dc/ukuran-ban-tidak-sesuai-keluaran-pabrik,-bisakah-ditilang> diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 15.00

A.4.3. Menggunakan setir/kemudi seperti motor *drag*

Sistem kemudi atau setir pada sepeda motor berfungsi sebagai pengarah dan pengendali jalannya kendaraan sepeda motor. Sistem kemudi terdiri dari setang kemudi (*handle bar/steering handle*), kepala kemudi (*steering head*), batang kemudi (*steering stem/steering tube*), dan komponen-komponen pendukung lainnya. Mengingat akan pentingnya peran dari setir/kemudi ini maka perubahan setir bawaan pabrik menjadi setir gapit atau setir yang menyerupai setir yang digunakan pada motor balap mempunyai dampak yang besar bagi kendaraan tersebut sehingga menimbulkan suatu masalah baru bilamana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentu saja dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain karena dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Berikut merupakan contoh penggunaan setir/kemudi seperti motor balap :

Gambar 10

Penggunaan setir/kemudi seperti motor *drag*



Pada gambar diatas menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Karena pengendara motor tersebut menggunakan setir/kemudi seperti motor *drag* pada kendaraannya tanpa memperdulikan keselamatan. Hal ini jelas dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan saat berkendara pengguna jalan lain, karena dengan penggunaan setir seperti motor *drag* tersebut secara otomatis pengemudi dapat merasa kesulitan bilamana akan berbelok arah karena sejatinya setir tersebut diperuntukkan hanya untuk lintasan lurus. Selain itu pada dasarnya kemudi yang panjang akan ringan digerakkan, namun kendaraan menjadi kurang lincah. Sebaliknya batang kemudi yang pendek membuat gerakan kendaraan menjadi lincah, namun

berat untuk dikendalikan. Sehingga dapat disimpulkan bawasannya menggunakan setir/kemudi seperti motor *drag* ini dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Dasar Hukum :

1. Pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

(1) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi: a. roda kemudi atau stang kemudi; dan b. batang kemudi.

(2) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dapat digerakkan; dan b. roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi.

(3) Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan

A.4.4 Modifikasi Tidak Menggunakan Rem Depan

Pengertian rem secara umum adalah²⁰ suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau menghentikan perputaran. Prinsip kerja sistem rem adalah mengubah tenaga kinetik menjadi panas dengan cara menggesekan dua buah logam pada benda yang berputar sehingga putarannya akan melambat, dengan demikian laju kendaraan menjadi pelan atau berhenti dikarenakan adanya kerja rem.

²⁰ <https://www.kanalinfo.web.id/2015/12/pengertian-rem-dan-fungsinya.html> diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 18.30 wib

Sistem rem pada kendaraan merupakan suatu komponen penting sebagai keamanan dalam berkendara, tidak berfungsinya rem dapat menimbulkan bahaya dan keamanan berkendara jadi terganggu. Oleh sebab itu komponen rem yang bergesekan ini harus tahan terhadap gesekan (tidak mudah aus), tahan panas dan tidak mudah berubah bentuk pada saat bekerja dalam suhu tinggi. Beberapa fungsi rem :

- a. Untuk memperlambat kecepatan atau menghentikan gerakan roda kendaraan.
- b. Mengatur kecepatan selama berkendara.
- c. Untuk menahan kendaraan saat parkir dan berhenti pada jalan yang atau menanjak.

Mengingat akan pentingnya peran kinerja rem pada kendaraan bermotor maka tidak menggunakan rem depan pada suatu modifikasi kendaraan bermotor mempunyai dampak yang sangat berarti bagi kendaraan tersebut sehingga menimbulkan suatu masalah baru bilamana tidak menggunakan rem depan pada suatu modifikasi dan tentu saja dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Berikut merupakan contoh modifikasi kendaraan bermotor tanpa menggunakan rem depan :

Gambar 11

Modifikasi tanpa menggunakan rem depan



Pada gambar diatas menunjukan pengendara bermotor yang telah melanggar Pasal 19 juncto Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Karena pengendara motor tersebut tidak menggunakan rem depan pada modifikasi kendaraanya. Hal ini jelas dapat membahayakan keselamatan saat berkendara baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain, karena dengan tidak adanya rem depan pada kendaraan tersebut secara otomatis telah menyalahi dari pada fungsi rem itu sendiri yaitu untuk mengatur kecepatan dalam berkendara dan untuk memperlambat kecepatan atau menghentikan gerakan roda kendaraan. Dengan kata lain pengendara tidak bisa

melakukan pengereman secara maksimal dan kendaraanapun tidak dapat berhenti dengan optimal seperti kendaraan standar pada umumnya karena hanya mengandalkan rem pada bagian belakang saja terlebih lagi bilamana melalui jalanan yang memiliki kontur naik turun. Sehingga dapat disimpulkan bawasannya modifikasi tanpa menggunakan rem depan ini sangat berbahaya dan tentu saja dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Dasar Hukum:

1. Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

(1) Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi: a. rem utama; dan b. rem parkir.

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman.

2. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012

Rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan

b. bekerja pada semua roda Kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu.

B. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas dibuat agar masyarakat mau menjalankan dan mematuhi perintah dari isi undang-undang tersebut untuk terciptanya ketertiban dan keselamatan dalam belalulintas dijalan sesuai ketentuan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya dimana kendaraan yang di kendarai sudah dimodifikasi namun modifikasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang dapat ditilang dan dipidana. Namun kenyataannya di lapangan banyak pengendara motor yang tidak mematuhi peraturan tersebut dikarenakan kurang tegasnya penegak hukum dalam menjalankan penegakkan hukum²¹.

Para pakar mengemukakan ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 4

mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Dari hasil penelitian yang dilakukan di berbagai tempat di Mojokerto, disimpulkan banyak masyarakat Mojokerto pemilik kendaraan bermotor yang masih belum patuh dan taat terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Sehingga jika dikaitkan dengan pendapat para ahli bahwa Undang-undang tersebut masih belum efektif dikarenakan banyak masyarakat pengendara kendaraan bermotor yang melanggar dan tidak menaati terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas²².

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

B.1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁴

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Undang-undang 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan pekerasan daya dukung jalan yang dilalui”

Dari keempat elemen diatas bila dihubungkan dan di kaitkan dengan peraturan tersebut pada elemen pertama ini masih belum sesuai dengan hasil penelitian kami teliti. Tetapi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto sangat relatife sesuai secara sistematis mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis karena peraturan tersebut sudah terdapat judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran yang menjelaskan tentang bidang-bidang kehidupan tentang bagaimana tata cara berkendara yang baik di jalan raya tentang modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80

berlalu lintas yaitu sanksi bagi pengendara kendaraan yang bermotor yang memodifikasi kendaraanya namun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sanksi bagi pengendara kendaraan yang bermotor yang memasang, menambah, mengurangi komponen pada kendaraan merwka sehingga dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas²⁵.

Peraturan tersebut sudah cukup sinkron dan tidak ada pertentangan secara hierarki maupun horizontal tidak ada pertentangan dengan ideologi Negara. Secara kualitatif dan kuantitatif, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Karena sudah mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan terdapat sanksi atau hukuman bagi para pelanggar. Dan penerbitan peraturan tersebut secara persyaratan yuridis sudah sesuai karena sekarang sudah diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat.

B.2. Fator Penegak Hukum

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 9

melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya²⁷.

Dalam kaitanya ketentuan peraturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka pihak penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan dan melaksanakan ketentuan peraturan tersebut adalah pihak kepolisian Polres Mojokerto. Polisi sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Tugas, Fungsi, kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan,

²⁶ *Ibid*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 82

dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan²⁸.

Menurut Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²⁹.

Di dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum maka polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

²⁸ Momo Kelana, 1984. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif* Jakarta: PTIK, halaman 18

²⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi³⁰.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana³¹.

Dari hasil wawancara dengan anggota Satlantas Polres Mojokerto AKP. Jarwoko, bahwa petugas Polres Mojokerto harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ada. Begitu juga tugas polisi khususnya Satlantas Polres Mojokerto juga harus patuh pada peraturan kepolisan. Tugas yang harus dilaksanakan Satlantas Polres Mojokerto yaitu dengan memeriksa, menyelidiki,

³⁰ Bisri Ilham, 1998. *Sisten Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, halaman 32

³¹ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, www.HukumOnline.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 19.32 WIB.

menguji, menelaah persoalan hukum khususnya mengenai lalu lintas dan menindak bagi pelanggar lalu lintas³².

Beliau menambahkan tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap 27 jenis pelanggaran tertentu, termasuk dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Terhadap pelanggar lalu lintas modifikasi kendaraan bermotor Satlantas Polres Mojokerto melakukan tindakan secara edukatif dan secara yuridis. Mojokerto merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur dan memiliki jumlah pemilik kendaraan terbanyak belum ditambah pendatang baru. Sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas di Mojokerto termasuk terbanyak di Jawa Timur³³.

Tugas dan fungsi Polisi khusus Satlantas tersebut diatur di Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

³² Hasil Wawancara Brigadir Jarwoko, Anggota Satlantas Mojokerto, Tanggal 05 September 2017

³³ *Ibid*

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan berlalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Pada setiap harinya Polres Mojokerto sebelum melakukan patrol lalu lintas maupun penindakan kepada para pelanggar lalu lintas selalu mengadakan apel oleh anggota Satlantas Polres Mojokerto sebagaimana di ilustrasikan pada gambar di bawah ini :

Gambar 12
Kegiatan yang dilakukan Satlantas Polres Mojokerto untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Mojokerto



Hasil Observasi: Tanggal 15 september 2017

Terlihat pada gambar 12 Kasatlantas memberi intruksi dan tugas kepada anggota Satlantas Mojokerto yang berkaitan dengan patroli lalu lintas demi menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di wilayah Mojokerto serta penanganan apabila terjadi kecelakaan di Wilayah Mojokerto. Anggota terbagi menjadi 2 kelompok anggota Satlantas Polres Mojokerto, kelompok pertama adalah anggota dengan menggunakan kendaraan motor yang bertugas dalam pengaturan lalu lintas dan penindakan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas di Mojokerto dan kelompok kedua dengan menggunakan

mobil patrol yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan daerah rawan mancet dan daerah rawan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Patroli lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Mojokerto merupakan kegiatan pengawasan lalu lintas terhadap arus lalu lintas dan pemakai jalan yang dilakukan dengan cara bergerak, kegiatan tersebut dilakukan pada daerah yang rawan mancet, rawan kecelakaan dan rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Untuk itu sebelum melakukan patroli lalu lintas anggota Satlantas Polres Mojokerto melakukan apel berupa perencanaan dalam hal menentukan wilayah yang nantinya di lakukan patroli lalu lintas demi memelihara ketertiban, keamanan dan dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mojokerto, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dalam hal melakukan patroli lalu lintas, anggota Satlantas Polres Mojokerto juga melakukan penindakan hukum maupun teguran kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas yang ada di Mojokerto sebagaimana di ilustrasikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 13
Penindakan oleh Satlantas Polres Mojokerto terhadap kendaraan bermotor yang sudah di modifikasi namun tidak sesuai dengan undang-undang



Hasil Observasi : Tanggal 16 September 2017

Pada gambar 13 Satlantas Polres Mojokerto melakukan penindakan kepada pengguna motor vespa yang telah dimodifikasi. Terdapat juga pengguna dan pemilik kendaraan vespa yang tidak memakai helm dan pada kendaraan bermotornya sudah dimodifikasi menjadi “vespa rongsok”. Dimana modifikasi tersebut telah memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas selain yaitu dengan menambahkan bagian dudukan di sebelah samping kanan bagian motor dengan peralatan seadannya dan tentu saja jauh dari kata layak untuk dipergunakan pada kendaraan bermotor. Selain itu pada kendaraan vespa tersebut juga tidak terdapat kaca spion, lampu utama, lampu

rem, lampu petunju arah dan tentu saja hal itu dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas pengguna jalan lain³⁴. Dengan kata lain hal tersebut sudah sangat jelas melanggar Pasal 285 Juncto Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penindakan kepada para pelanggar lalu lintas oleh Satlantas Polres Mojokerto merupakan tugas dan fungsi Polisi khusus Satlantas yang diatur di pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan). Penindakan atau lebih dikenal dengan razia dilakukan untuk menekan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Mojokerto sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan mampu mewujudkan masyarakat yang beretika baik dalam berlalu lintas.

Berdasarkan observasi di Satlantas Polres Mojokerto, data pelanggaran lalu lintas dan jumlah pelanggaran terhadap pemasangan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai³⁵:

³⁴ Hasil observasi, *penindakan pelanggar lalu lintas* ,oleh Satlantas Polres Mojokerto pada tanggal 16 September 2017

³⁵ Hasil observasi, *data pelanggaran lalu lintas*, di Polres Mojokerto pada tanggal 31 Agustus 2017

Tabel 1
JUMLAH PELANGGAR LALU LINTAS
YANG DI TINDAK TAHUN 2014 – 2017

No	TAHUN	TILANG	TEGURAN SIMPATIK	JUMLAH PELANGGAR LALU LINTAS
1	2014	23842	17413	41255
2	2015	21143	3301	24444
3	2016	17306	3418	20724
4	2017	12071	4522	16593

Sumber data : hasil *input* data yang diolah di Polres Mojokerto pada tanggal 16 September 2017

Pada tabel 1 menunjukan jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh Satlantas Polres Mojokerto dari tahun 2014 sampai tahun 2017 berupa tindakan tilang maupun teguran simpatik³⁶.

Dari tabel 1 dapat dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun menurun, dimana dari tahun 2014 menunjukan jumlah pelanggaran berjumlah 23.842 dan teguran simpatik berjumlah 17.413, menurun di tahun 2015 menjadi 21.143 pada tindakan tilang dan 3.301 pada teguran simpatik. Lalu menurun pada tahun 2016 dengan 17.306 tindak tilang dan teguran simpatik berjumlah 3.418 dan di tahun 2017 dengan jumlah tindakan tilang berjumlah 12.071 dan teguran simpatik berjumlah 4.522. Dalam hal tersebut Satlantas Polres Mojokerto sangat berupaya menekan jumlah tindak pidana pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat Mojokerto.

³⁶ Hasil Wawancara Brigadir Jarwoko, Anggota Satlantas Mojokerto, Tanggal 16 september 2017

Selanjutnya pada tabel dibawah menunjukan jumlah tilang pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas khususnya mengenai modifikasi yang dapat membahayakan keselamatan berkendara pengguna jalan lain tahun 2015 dan 2016 :

Tabel 2
JUMLAH PELANGGARAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DAN DAPAT
MENYEBABKAN KECELAKAAN BERLALU LINTAS YANG DI TINDAK
SATLANTAS POLRES MOJOKERTO

No	Bulan	Tahun	
		2015	2016
1	Januari	19	7
2	Febuari	21	16
3	Maret	17	13
4	April	13	9
5	Mei	11	14
6	Juni	6	13
7	Juli	15	19
8	Agustus	31	22
9	September	17	6
10	Oktober	9	11
11	November	11	13
12	Desember	44	39
Jumlah		214	182

Sumber data: hasil data yang diolah di Polres Mojokerto pada tanggal 15 September 2017

Dari tabel 2 di atas menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh satlantas Mojokero terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya mengenai modifikasi yang dapat membahayakan keselamatan berkendara pengguna jalan lain terbilang cukup rendah di bandingkan dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang lain³⁷.

Dari hasil penelitian yang diperoleh data di Polres Mojokerto maupun dari data yang diperoleh di wilayah Hukum Polres Mojokerto menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalam menekan dan menindak angka pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 masih belum maksimal. Dikarenakan masih banyak pemilik dan pengendara kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang kami lakukan di beberapa ruas jalan (Jalan Masjid, Jalan Airlangga, Jalan Raya Gajahmada dan Jalan Pemuda), area sekitar Stadion Gajahmada dan area parkir Ruko Royal.

Sehingga kinerja Polres Mojokerto dalam menindak pelaku pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan undang-

³⁷ Hasil Wawancara Brigadir Jarwoko, Anggota Lantas Polres Mojokerto, Tanggal 15 September 2017

undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan masih belum optimal, kebijaksanaan dan penindakan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat masih kurang dan tidak membuat masyarakat menjadi jera.

B.3. Faktor Sarana dan Prasarana

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah³⁸ :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya³⁹.

Untuk sarana dan prasarana yang terdapat di Polres Mojokerto berdasarkan hasil penelitian di tempat tersebut sudah lumayan lengkap dan relatif tidak ada masalah. Dimana prasarana yang telah ada telah terpelihara dengan baik dan cukup lengkap yang berkaitan dengan sarana dan prasarana

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit : Rajawali Pers

³⁹ *Ibid* halaman 82

lalu lintas meliputi pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, mobil patroli lalu lintas (pengawalan dan pengamanan), dan sarana dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

B.4. Faktor Masyarakat

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi⁴⁰.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial⁴¹.

Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat Mojokerto menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi

⁴⁰ *Ibid* halaman 83

⁴¹ *Ibid*

Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat Mojokerto tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Tabel di bawah adalah 10 (sepuluh) responden masyarakat pengendara motor berkaitan tentang faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas. Kesepuluh responden tersebut di dapat dari beberapa golongan masyarakat yang ada di Mojokerto⁴².

Tabel 3
Responden masyarakat pengendara motor berkaitan tentang faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

No	Nama	Pekerjaan	Faktor Penyebab		
			Faktor Peraturan yang kurang baik	Faktor Penegak hukum yang kurang tegas	Faktor Minimnya informasi terkait dengan modifikasi yang sesuai dengan Undang-undang
1	Danang	Mahasiswa		✓	✓
2	Putra Setiawan	Mahasiswa	✓	✓	

⁴² Hasil observasi wawancara dengan sepuluh (10) responden mengenai faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor

3	Ardy	Mahasiswa		✓	
4	Firman.D.A	Pelajar		✓	
5	Candra Yogi	Wiraswasta		✓	
6	Andi.R	Pelajar		✓	✓
7	Eri Galuh	Wiraswasta		✓	
8	Dicky.W	Pelajar		✓	
9	Andre Firmansyah	Pelajar		✓	
10	Khris Martha	Pelajar		✓	

Sumber Data: hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus – 15 September 2017

Hasil wawancara langsung dengan saudara Danang, beliau berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaran bermotor adalah faktor minimnya informasi yang menjelaskan tentang tata cara modifikasi kendaran bermotor yang sesuai dengan ketentuan undang-undnag yang berlaku. Dari faktor penegak hukum dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut dikarenakan kurang sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaran bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas⁴³.

⁴³ Wawancara dengan saudara Danang dan Putra Setiawan. Mahasiswa Unesa. Tanggal 31 Agustus 2017

Responden selanjutnya adalah saudara Putra Setiawan. Beliau berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaraan bermotor terletak pada faktor undang-undang yang menjelaskan tentang modifikasi yang tidak jelas dan faktor penegak hukum yang kurang sosialisasi terhadap penjelasan undang-undang atau peraturan mengenai ketentuan modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan yang berlaku⁴⁴.

Responden selanjutnya adalah Ardy. Beliau berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaraan bermotor adalah Faktor dari penegak hukum itu sendiri. Karena banyak pihak penegak hukum yaitu pihak polisi yang melakukan pembiaran terhadap para pelanggar lalu lintas khususnya mengenai modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Pihak kepolisian mau bertindak kalau mereka sedang terdesak karena kepentingan mereka sendiri dan pihak polisi bertindak kalau ada perintah dari atasannya maupun perintah tugas dari Kapolri⁴⁵.

Responden selanjutnya adalah Firman.D.A, pelajar kelas 11 SMA N 1 Mojokerto. Beliau berpendapat faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaraan bermotor

⁴⁴ Wawancara dengan saudara Ardy. Mahasiswa ITS. Tanggal 31 Agustus 2017

⁴⁵ Wawancara dengan saudara Firman.D.A. Pelajar SMA 1 Mojokerto. Tanggal 02 September 2017

adalah faktor dari pihak kepolisian yang kurang mensosialisasi hukum lalu lintas kepada para pelajar dan masyarakat, sehingga banyak pelajar dan masyarakat yang melanggar peraturan tersebut⁴⁶.

Responden selanjutnya Candra Yogi wiraswasta yang bertempat tinggal di daerah Pungging Kab.Mojokerto. Beliau berpendapat kalau banyaknya masyarakat maupun pelajar yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas terhadap pemasangan modifikasi kendaran bermotor adalah faktor dari penegak hukum yang kurang memberi teguran maupun tindakan kepada pelanggar, karena pihak kepolisian yang hanya fokus pada masyarakat yang tidak memakai helm atau tidak membawa SIM⁴⁷. Padahal pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan ini banyak ditemukan di daerah Mojokerto dan tentunya dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain.

Responden selanjutnya Andi.R. pelajar kelas 12 SMK Pahlawan Mojosari-Mojokerto. Beliau berpendapat kalau banyaknya masyarakat maupun pelajar yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor adalah faktor dari penegak hukum. Pihak polisi kurang mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur terkait modifikasi kendaraan bermotor, beliau merasa kalau banyak

⁴⁶ Wawancara dengan saudara Candra Yogi, wiraswasta. Tanggal 04 September 2017

⁴⁷ Hasil wawancara dengan saudara Andi.R Pelajar kelas 12 SMK Pahlawan Mojosari. Tanggal 07 September 2017

pelajar maupun masyarakat yang belum mengerti tentang aturan modifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang⁴⁸.

Responden selanjutnya adalah saudara Eri Galuh. Beliau berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaraan bermotor adalah Faktor pihak kepolisian, sebagian masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa merubah bentuk atau merubah kendaraan bermotor sesuai dengan keinginan mereka itu melanggar peraturan lalu lintas. Masyarakat hanya mendapat teguran dari pihak kepolisian apabila ada razia bukan tindakan pidana yaitu tindakan tilang. Hal ini menunjukan pihak kepolisian masih belum melaksanakan peraturan tersebut dengan bijak, banyak petugas polisi yang tebang pilih dalam menindak pengendara yang melakukan pelanggaran masalah modifikasi, pihak polisi hanya melakukan teguran kepada pemilik kendaraan bermotor mahal dan berCC besar sedangkan kepada pemilik kendaraan berCC rendah petugas memberi tindakan tilang, bahkan tindakan penahan kendaraan. Hal ini yang membuat ketidakadilan di masyarakat⁴⁹.

Responden selanjutnya adalah Dicky.W, Beliau berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum

⁴⁸ Hasil wawancara dengan saudara Eri Galuh. Wiraswasta asal Mojosari . Tanggal 07 September 2017

⁴⁹ Hasil wawancara dengan saudara Dicky.W. Pelajar MAN Mojosari Tanggal 10 September 2017

tentang TNKB adalah Faktor pihak penegak hukum, dikarenakan pihak kepolisian yang kurang tegas dalam memberi hukuman kepada pelanggar, sehingga banyak masyarakat yang terus mengulang tindak pelanggaran tersebut⁵⁰.

Responden selanjutnya adalah saudara Andre Firmansyah berpendapat faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaraan bermotor adalah faktor dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya terpusat pada kelengkapan kendaraan berupa penindakan terhadap pengguna kendaraan yang tidak memakai helm, tidak membawa SIM dan STNK maupun yang menerobos lampu merah. Sedangkan masalah pelanggaran modifikasi kendaraan yang tidak sesuai undang-undang banyak pihak kepolisian yang tidak bertindak tegas pada pelanggaran tersebut dan padahal ketentuan tentang modifikasi telah diatur dalam undang-undang⁵¹.

Responden selanjutnya adalah saudara Khris Martha berpendapat faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan ketentuan hukum tentang modifikasi kendaraan bermotor adalah faktor dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang hanya menegur kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas beliau rasa tidak membuat masyarakat jera untuk mengulangi perbuatannya lagi, dengan pihak kepolisian yang tegas dan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan saudara Andre Firmansyah Pelajar SMK Raden Patah. Tanggal 15 September 2017

⁵¹ Hasil wawancara dengan saudara Kris Martha, Tanggal 18 September 2017

menindak kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas pasti membuat masyarakat jera dan nantinya akan ditiru oleh masyarakat lainnya untuk tidak melanggar peraturan lalu lintas.

Dari hasil wawancara langsung kepada 10 (sepuluh) responden masyarakat pengendara dan pengguna jalan yang ada di Mojokerto, 10 (sepuluh) responden memilih faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah pada faktor penegak hukum yang kurang wibawa atau tegas dan dari 10 (sepuluh) responden yang memilih faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, 1 (satu) responden memilih faktor undang-undangnya yang kurang baik. Selanjutnya dari 10 (sepuluh) responden yang telah di wawancarai, 2 (dua) responden memilih faktor minimnya informasi terkait dengan modifikasi yang sesuai dengan Undang-undang sebagai alasan mereka⁵².

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Belalu Lintas adalah dari faktor penegak hukum yang kurang berwibawa atau kurang tegas dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan tersebut, hal tersebut sangat relevan dengan pendapat Achmad Ali yang mengemukakan bahwa pada

⁵² Hasil wawancara yang diperoleh dari sepuluh (10) responden yaitu pengendara sepeda motor di wilayah Hukum Polres Mojokerto

umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut⁵³. Selain itu dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sendiri yang belum jelas mengenai ketentuan ukuran spesifik batasan-batasan modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai dan diperbolehkan untuk dipergunakan dalam berkendara di jalan raya.

Dari keempat elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan, teguran, tindakan dan bahkan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuannya agar masyarakat patuh terhadap aturan berlalu lintas. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 375

B.5. Faktor Kebudayaan

Pada elemen kelima yaitu kebudayaan. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang⁵⁴.

Efektivitas penegakan hukum memang bergantung pada kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh di Propinsi Bali, penegakan aturan penggunaan helm di Bali terkendala oleh budaya setempat yang mengharuskan orang Bali menggunakan alat penutup kepala sesuai adat Bali apabila menghadiri acara adat tertentu. Walaupun tidak menggunakan helm tetapi Polisi tidak bisa menindak pelanggar yang tidak menggunakan helm ini karena terbentur dengan adat setempat.

Mojokerto yang tidak mempunyai kebudayaan seperti di Pulau Bali mau tidak mau masyarakat harus patuh dan tunduk pada hukum positif Indonesia yang berlaku. Sehingga pada siapa yang melanggar pelanggran lalu lintas maka harus di hukum menurut ketentuan yang berlaku.

⁵⁴ *Ibid*

Berdasarkan penelitian, masyarakat Mojokerto tingkat kepatuhan terhadap perturan lalu lintas sangatlah rendah , hal ini dapat dilihat banyak masyarakat yang sudah meninggalkan kebudayaan tertib lalu lintas seperti tidak memakai helm, berbonceng lebih dari dua orang, memodifikasi kendaraan tidak pada ketentuan sampai pada hal terkecil yaitu tentang pemasangan TNKB. Walaupun dianggap sepele, modifikasi kendaraan bermotor sudah ada peraturan yang mengatur yaitu diatur dalam pasal 50 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas⁵⁵. Selain Undang-Undang di dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 juga mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor.

Di mana ketika kebudayaan berlalu lintas yang dianut masyarakat salah atau telah melanggar ketertiban dan disaat itu tidak adanya penegak hukum yang tegas dan berwibawa, maka kebudayaan salah tersebut akan diikuti masyarakat banyak. Karena mencegah pelanggaran lalu lintas adalah masalah serius, rendahnya kepatuhan hukum menyebabkan buruknya moral masyarakat.

Oleh karena itu kebudayaan seperti itu harus di hilangkan, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran dari pihak kepolisian sangatlah penting dalam menghilangkan kebudayaan berlalu lintas seperti itu. Kebudayaan berlalu lintas yang benar dan bersifat positif yang menyebabkan seseorang

⁵⁵ Berdasarkan hasil observasi di beberapa ruas jalan dan area parkir di wilayah Hukum Polres Mojokerto

tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif, dalam hal ini kewibawaan dan ketegasan pihak polisilah yang sangat berperan. Pada takaraan umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidaknya nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berkaitan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas harus dilaksanakan seefektif mungkin sesuai isi peraturan tersebut. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian kurang tegas dalam menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas⁵⁶.

⁵⁶ *Ibid*

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas tersebut telah tercapai.

C. Kendala Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Tentang Sanksi Modifikasi Kendaran Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas Dan Solusinya

Beberapa kendala yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pasal 58 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas yaitu⁵⁷:

C.1. Faktor Undang-Undang

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

⁵⁷ Hasil Observasi di Polres Mojokerto Maupun di Wilayah Hukum Polres Mojokerto

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara⁵⁸.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi⁵⁹:

“Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam Negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dari isi ketentuan hukum dan sanksi menurut pendapat Soerjono Soekanto⁶⁰ sangat relatif sesuai secara sistematis mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis karena peraturan tersebut sudah

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit : Rajawali Pers

menjelaskan tentang bidang-bidang kehidupan tentang bagaimana tata cara berkendara yang baik di jalan raya tentang modifikasi kendaraan bermotor yaitu sanksi bagi pengendara kendaraan yang bermotor yang memodifikasi kendaraan bermotornya namun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau sanksi bagi pengendara kendaraan yang bermotor yang memodifikasi kendaraan bermotornya namun namun modifikasi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan dalam berlalu lintas⁶¹.

Peraturan tersebut sudah cukup sinkron dan tidak ada pertentangan secara hierarki maupun horizontal tidak ada pertentangan dengan ideologi Negara. Secara kualitatif dan kuantitatif, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Karena sudah mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan terdapat sanksi atau hukuman bagi para pelanggar. Dan penerbitan peraturan tersebut secara persyaratan yuridis sudah sesuai karena sekarang sudah diberlakukan dan diterapkan kepada masyarakat.

Namun dalam penerapan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat kelemahan, yaitu⁶²:

⁶¹ *Ibid*

⁶² Hasil Observasi di Polres Mojokerto dan di wilayah Hukum Polres Mojokerto

1. Tidak adanya peraturan yang spesifik mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam modifikasi kendaraan bermotor. Di mana dalam ketentuan undang-undang tidak ada penjelasan mengenai aturan-aturan spesifik mengenai apa saja yang boleh dan tidak dalam memodifikasi kendaraan. Apabila pemilik kendaraan bermotor akan memodifikasi kendaraanya, apa perlu lapor terlebih dahulu kepada kepolisian atas modifikasi yang akan dilakukannya, apa perlu menunggu dari pihak kepolisian yang selanjutnya akan di tindak lanjuti oleh perusahaan atau bengkel modifikasi yang ditunjuk oleh pihak Kepolisian.

2. Sanksi yang masih kurang berat

Dalam ketentuan isi pasal 277 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas menyebutkan bahwa setiap Setiap orang yang memaksukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam Negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

yang dirasa masih belum berat karena hukuman pidana kurungan dan hukuman denda belum membuat masyarakat yang melanggar jera. Sehingga perlu adanya hukuman yang maksimal kepada para pelanggar lalu lintas untuk tidak mengulangi pelanggaran dan dapat mencegah pengendara kendaraan bermotor lainnya untuk melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas. Karena pelanggaran tersebut menjadi salah satu faktor terbesar dalam terjadinya kecelakaan berlalu lintas di daerah Mojokerto dalam kurun beberapa tahun ini.

C.2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Situasi lalu lintas saat ini khususnya di daerah Mojokerto diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlintasan yang aman, tertib dan lancar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia.

Tabel dibawah adalah 10 (sepuluh) responden yang peneliti wawancara terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang

Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas, 10 responden adalah masyarakat Mojokerto pemilik kendaraan bermotor yang tidak sesuai yang peneliti dapatkan secara acak dari berbagai ruas jalan dan area sekitar Stadion Gajahmada maupun di sekitar ruko Royal Mojokerto-Mojokerto

Tabel 4
Responden mengenai alasan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas

Tanggal Penelitian	Nama	UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan		Terjaring Razia Polisi berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang	
		Mengetahui Peraturan	Tidak Mengetahui Peraturan	Pernah	Tidak
09-09-2017	Yosy Pratama	✓			✓
09-09-2017	Iqbal Fauzi	✓		✓	
09-09-2017	Ridwan Hanif	✓			✓
10-09-2017	Nugrah.S		✓		✓
10-09-	Lukman		✓	✓	

2017					
10-09- 2017	Rinal Arya		✓		✓
16-09- 2017	Fery.S	✓			✓
16-09- 2017	Cahyo Indra	✓			✓
16-09- 2017	Nasrul	✓			✓
16-09- 2017	Sugiantoro	✓			✓

Sumber data diperoleh dari: hasil observasi yang diolah dengan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tidak sesuai di wilayah Hukum Polres Mojokerto.

Hasil wawancara langsung dengan saudara Yosy Pratama, menurutnya bahwa saudara Yosy mengetahui jika merubah bentuk kendaraan bermotor merupakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, saudara Yosy mengetahui dari internet berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi kendaran bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas dan sebelumnya saudara Yosy juga belum pernah terkena razia oleh pihak kepolisian ketika menggunakan kendaraan motor miliknya⁶³.

⁶³ Wawancara dengan saudara Yosy Pratama pada tanggal 09 September 2017

Responden selanjutnya adalah saudara Iqbal Fauzi, menurutnya bahwa saudara Iqbal telah mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas karena saudara Iqbal merupakan mahasiswa fakultas hukum di salah satu universitas yang ada di kota Surabaya, saudara Iqbal mengetahui ketentuan hukum namun ia malah melanggar ketentuan hukum tersebut. Saudara Iqbal pernah terkena razia polisi berkenaan dengan modifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu menggunakan ban cacing/tapak ban yang berukuran kecil dan saudara Iqbalpun mendapatkan sanksi tilang oleh aparat kepolisian⁶⁴.

Responden selanjutnya adalah saudara Ridwan Hanif, menurutnya bahwa saudara Ridwan telah mengetahui bahwa mengganti, menambah, mengurangi komponen pada kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar pabrikan merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap lalu lintas, ia memasang aksesoris tambahan pada kendaraannya berupa lampu LED yang cukup menyilaukan apabila di lihat oleh pengguna jalan lain sehingga menurut saudara Ridwan dengan memasang aksesoris tersebut akan membuat motornya keren dan selama menggunakan kendaraan dengan aksesoris yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini belum

⁶⁴ Wawancara dengan saudara Iqbal Fauzi pada tanggal 09 September 2017

pernah kena tindakan dari pihak kepolisian dalam razia resmi maupun tidak⁶⁵.

Responden selanjutnya adalah saudara Nugrah.S, menurutnya bahwa saudara Nugrah belum mengetahui kalau merubah bentuk kendaran bermotornya adalah perbuatan melanggar ketentuan lalu lintas, lebih lanjut saudara Nugrah mengatakan kalau selama menggunakan kendaraan bermotor di jalan dengan modifikasi dengan merubah bentuk fisik yakni mengganti warna cat yang tidak sesuai dengan warna yang tercantum pada STNK dan BPKB belum pernah ditindak maupun di tegur oleh pihak kepolisian, maka dari itu ia tidak tau kalau merubah cat asli bawaan kendaraan bermotor dengan warna yang sedang *tren* pada zaman ini adalah perbuatan melawan hukum⁶⁶.

Responden selanjutnya adalah saudara Lukman, menurutnya bahwa saudara Lukman sebelumnya belum mengetahui tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas, namun setelah mendapat teguran dari pihak kepolisian, saudara Lukman mengetahui kalau memasang lampu LED yang menyilaukan adalah melanggar ketentuan hukum lalu lintas. Karena melihat temanya dalam satu komunitas motor memasang lampu LED pada

⁶⁵ Wawancara dengan saudara Ridwan Hanif pada tanggal 09 September 2017

⁶⁶ Wawancara dengan saudara Nugrah.S pada tanggal 10 September 2017

kendaraannya , maka saudara Lukman ikut-ikutan padahal perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan⁶⁷.

Responden selanjutnya adalah saudara Rinal Arya, menurutnya bahwa saudara Rinal belum mengetahui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas, dengan alasan saudara Rinal mengatakan kalau belum adanya sosialisasi membuat ia tidak tau ketentuan modifikasi yang sesuai seperti apa dan selama mengendarai di jalan raya, saudara Rinal pernah terkena razia namun berkaitan dengan melanggar larangan parkir tetapi pihak polisi tidak menyingung masalah modifikasi kendaraannya sehingga saudara Rinal beranggapan kalau modifikasi kendaraannya sudah sesuai⁶⁸.

Responden selanjutnya adalah saudara Fery.S, Cahyo Indra, Nasrul Lutfhi dan Sugiantoro. Mereka adalah anggota salah satu komunitas motor yang ada di Mojokerto. Hampir semua anggota komunitas tersebut pada kendaraannya dalam modifikasi kendaraanya tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan, mereka mengetahui kalau kendaraan mereka terkait modifikasi telah melanggar aturan hukum, karena sebelumnya mereka

⁶⁷ Wawancara dengan saudara Lukman pada tanggal 10 September 2017

⁶⁸ Wawancara dengan saudara Rinal Arya pada tanggal 10 September 2017

menghadiri sebuah acara komunitas motor di Kota Surabaya terkait acara tata cara berkendara dengan benar dan safety riding yang bekerja sama dengan Polresta Surabaya yang juga dibahas tentang masalah modifikasi kendaraan, namun mereka akan tetap mempertahankan modifikasi kendaraan bermotor mereka dengan gaya yang sekarang dan tidak mentaati ketentuan yang berlaku dengan alasan selama belum ditindak oleh pihak kepolisian maka tidak akan mengubah modifikasi kendaraan bermotor mereka sesuai dengan ketentuan⁶⁹.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pemilik kendaraan bermotor melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang sehingga perlu ada tindakan dari aparat penegak hukum terutama untuk menekan tindak pelanggaran lalu lintas terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan

⁶⁹ Wawancara dengan saudara Fery.S, Cahyo Indra, Nasrul, Sugiantoro pada tanggal 16 September 2017

suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dalam kaitannya dengan efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan tingkah laku masyarakat menurut suatu pola tertentu.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, dapat dikemukakan di sini bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan, pendidikan dan sosialisasi. Berikut penjelasannya⁷⁰:

⁷⁰ Hasil Observasi di Polres Mojokerto dan di Wilayah Hukum Mojokerto

a. Tindakan

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman (sanksi) atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan masyarakat terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kecelakaan berlalu lintas. Sehingga pihak kepolisian harus bisa melaksanakan ketentuan hukum yang terdapat pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang modifikasi kendaraan bermotor yaitu dengan penindakan berupa yuridis agar pelanggar lalu lintas jera dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Karena Dalam hukum pidana, apabila efektivitas sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep rancangan KUHP, maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila:

1. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana.
2. Dapat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

3. Dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat⁷¹.

b. Pendidikan

Bekerja sama dengan Pemerintah Mojokerto maupun Dinas Pendidikan Mojokerto dengan memasukkan program pendidikan lalu lintas ke kurikulum, dalam hal ini polisi bekerja sama dengan dinas pendidikan nasional memasukkan materi pendidikan lalu lintas, dalam langkah awalnya dimasukkan ke mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam program tersebut polisi juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut, sasaran dari program ini adalah sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Maksud dari program ini adalah untuk menekankan kepada siswa disekolah bahwa menaati aturan-aturan lalu lintas wajib dilakukan demi terciptanya suatu kehidupan berlalu lintas yang tertib dan teratur. Dengan menekankan pendidikan berlalu lintas sejak dini, diharapkan saat dewasa nanti mereka sudah mempunyai bekal untuk melakukan aktifitas berlalu lintasnya dengan baik dan benar.

c. Sosialisai atau penyuluhan Hukum Terhadap Masyarakat dan Komunitas Motor

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 204, halaman 48

Penyuluhan hukum adakah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya dalam berkendara di jalan raya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi peraturan lalu lintas.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : pihak perwakilan Polres Mojokerto melakukan ceramah, diskusi, temu, dan simulasi kepada masyarakat pengendara motor di Mojokerto berkaitan tentang isi dan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti : Polres Mojokerto dalam setiap bulan menerbitkan majalah tentang aturan-aturan dalam berkendara bermotor

di jalan raya, sehingga dengan media/perantara majalah masyarakat memahami tentang tata cara berkendara dengan benar dan mengetahui isi dan ketentuan peraturan lalu lintas atau Polres Mojokerto melakukan kerja sama dengan sebuah radio di Mojokerto dalam melakukan penyuluhan atau sosialisas tentang isi dan ketentuan peraturan lalu lintas.

Penyuluhan dan sosilalisasi hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

C.3. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat⁷², mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

⁷² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Penerbit : Askara Baru, Halaman 42-45

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang⁷³.

Pada tabel 4 dapat menunjukan banyak masyarakat Mojokerto yang mengerti hukum namun masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas.

Berdasarkan dengan wawancara dengan pemodifikasi kendaraan bermotor, sebagian dari mereka berkata bahwa mereka telah mengetahui tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait modifikasi yang sesuai dengan aturan yang tercantum pada undang-undang, namun karena permintaan masyarakat yang aneh-aneh terkait mengubah bentuk kendaraan bermotornya supaya terlihat berbeda dengan yang lain, maupun memodifikasi motor mereka yang terbilang cukup *extreme* bahkan sudah berubah secara keseluruhannya dari bentuk awal motor pabrikan pada umumnya. Mau tak mau mereka harus melayani kemauan masyarakat, karena memodifikasi kendaraan adalah pekerjaan mereka sehari-hari⁷⁴.

Kebudayaan masyarakat yang salah nantinya akan diikuti oleh masyarakat lainya maka itu perlu pentingnya peran penegak hukum untuk

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan pemodifikasi kendaraan bermotor pada tanggal 15 September 2017

mengubah budaya masyarakat. Sehingga perlu dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum ⁷⁵.

Pencapaian sesuatu hanya dapat dilakukan jika budaya hukum menopang konsepsi instrumental dan hukum untuk mengarah secara jelas dan hubungan dengan sistem hukum. Tolak ukur tegaknya hukum di bidang lalu lintas sangat tergantung pada budaya masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan serta kepentingan-kepentingan. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat untuk tertib lalu lintas tidak dapat dipisahkan pada sistem budaya hukum masyarakat untuk berlalu lintas (*legal culture*) yang merupakan nilai-nilai (*values*) dan cara pandang/sikap (*attitudes*) yang terdapat dalam suatu masyarakat, dimana *values* dan *attitudes* tersebut itulah yang menempatkan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat⁷⁶.

Faktor masyarakat dan kebudayaan memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penciptaan budaya taat hukum masyarakat untuk berlalu lintas harus menghilangkan persepsi bahwa arti hukum bukanlah hanya sebatas petugas,

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 87

⁷⁶ *Ibid*

sehingga persepsi ini berakibat pada baik buruknya hukum senantiasa tergantung pada pola perilakunya petugas yang menegakkan hukum.

C.4. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek *cultural* yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Namun apabila aparat penegak hukum memberi teladan yang salah maka akan membuat masyarakat tidak tunduk pada hukum. Oleh karena itu timbul faktor kesengajaan masyarakat untuk melanggar peraturan lalu lintas, yang disebabkan:

1. Penindakan aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang-undang tersebut Khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Kurang sosialisasi hukum kepada masyarakat.

3. Kurangnya sikap tegas kepada para pelanggar lalu lintas.
4. Pemberian surat tilang kepada pelanggar, tidak langsung diproses di pengadilan.
5. Aparat penegak hukum hanya memberikan kebijaksanaan di jalan.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan⁷⁷.

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Dalam hal ini setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan adanya penyimpangan. Dengan kata lain adalah dalam penegakan hukum harus diperhatikan terciptanya kepastian hukum.

Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak boleh

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 204, halaman 42

dilupakan dalam penegakan hukum adalah terciptanya keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan terhadap diperhatikannya masalah keadilan dalam penegakan hukum⁷⁸.

Karena itu penegak peraturan lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sifat yang lugas, tegas dan adil, penegak hukum harus menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya di lain pihak juga harus percaya diri karena penegak hukum akan mengambil keputusan yang bijaksana untuk menghasilkan keadilan. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

⁷⁸ *Ibid*